

**RENCANA KERJA  
DISPERINDAG  
(RENJA DISPERINDAG )  
Tahun 2022**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN TABANAN  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa karena atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, Rencana Kerja Awal (Ranwal ) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat tentang Rencana Kerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan di Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan Tahun 2023 merupakan Rencana Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan merupakan Perangkat Daerah yang mengemban urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan 2016-2021 yang didalamnya mengharuskan penyusunan Rencana Kerja yang menggambarkan Target Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dalam meningkatkan Kinerja menuju Pemerintahan yang *Good Governance*.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan yang kami susun ini, sehingga usul dan saran yang bermanfaat sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimasa yang akan datang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan ini.

Tabanan, 16 Agustus 2022

Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Tabanan,



**Ir. WAYAN KOTIO, MP**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19651231 1992031 179

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 mengacu pada perencanaan Nasional dan Provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan baik dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Tabanan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh

Rencana Kerja (Renja) Disperindag Kabupaten Tabanan adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022 oleh Disperindag Kabupaten Tabanan untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan yang ada baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kab.), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Prov.) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dan menjadi pedoman serta rujukan dalam menyusun program dan Renja Disperindag

Tahun 2022 kegiatan tahun 2022 yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, serta antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengacu pada kemampuan keuangan daerah, sehingga program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdayaguna dan berhasil guna serta tepat sasaran

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
  19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 - 2025;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 9).
  23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021.
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
  26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

### 1.3 Maksud Dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan Tahun 2022 dimaksudkan untuk :

- a. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Tabanan 2021 – 2026 kedalam rencana program prioritas kegiatan tahunan daerah
- b. Menciptakan sinergitas pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah dalam rangka pembangunan daerah

#### 1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini adalah untuk:

- a. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tabanan Tahun 2022.
- b. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Disperindag Kabupaten Tabanan Tahun 2022.
- c. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja OPD Disperindag Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja ini memberikan penjelasan mengenai target kinerja Disperindag Kabupaten Tabanan tahun 2022. Target Kinerja ( performance targets ) tahun 2022 tersebut nantinya menjadi acuan Penetapan Kinerja ( performance agreement ) tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Disperindag Kabupaten Tabanan Tahun 2022

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TABANAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TABANAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan
- 3.3 Program dan Kegiatan

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TABANAN

## BAB V PENUTUP



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra**

Pembangunan sektor Perindustrian dan Perdagangan, sebagai motor penggerak perekonomian, akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan. Sektor Industri dan Perdagangan telah menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi perekonomian Kabupaten Tabanan. Untuk itu peran Industri dalam perekonomian dan Pengembangan Industri kecil termasuk Industri tradisional dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas serta pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dalam rangka pemanfaatan seoptimal mungkin potensi sektor pertanian haruslah menjadi prioritas sebagai kontribusi PDRB dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi. Serta peran serta dari pasar yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dapat digunakan sebagai pengukur indikator pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Semakin banyak orang yang bertransaksi di suatu pasar, maka perekonomian daerah tersebut akan menjadi meningkat, hal ini dipengaruhi juga oleh kondisi fisik pasar itu sendiri, terutama pasar tradisional yang semakin lama kondisinya semakin memprihatinkan.

Kemajuan pembangunan industri dapat dilihat dari perkembangan indikator antara lain perkembangan unit usaha industri formal dan informal menunjukkan angka perkembangan dari tiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa di Kabupaten Tabanan pertumbuhannya mulai membaik. Perkembangan kinerja sektor perdagangan juga menunjukkan trend yang terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dalam sektor perdagangan, Perkembangan Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) menjadi salah satu indikator yang sangat penting. Dengan semakin meningkatnya Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah, maka kualitas produk barang dan jasa semakin terjamin sehingga semakin meningkatkan pengamanan perdagangan yang ada.

Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Disperindag Kabupaten Tabanan Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Disperindag Kabupaten Tabanan Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Disperindag Kabupaten Tabanan Tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Disperindag Kabupaten Tabanan Tahun 2022 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2022;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

➤ **Evaluasi Program Tahun 2022**

Secara keseluruhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 telah menganggarkan Renja Disperindag Tahun 2022 pembiayaan seluruh kegiatannya yang total keseluruhan anggaran sebesar Rp 36.538.110.406,-

Dari total anggaran tersebut yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung sasaran strategis yang pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis.

Secara ringkas komposisi penggunaan tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.1** Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja  
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai  
dengan Tahun 2022 di Kabupaten Tabanan



**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TABANAN**

NO		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGAITAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN s/d 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 ( n-2 )				TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022		
				REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9)	11=10/4	
<b>URUSAN WAJIB</b>											
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Outcome</b>	<b>:</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Outcome</b>	<b>:</b>	<b>Persentase bangunan pasar rakyat yang layak, terfasilitasi dan terawasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Output	:	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terevitalisasi	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>
<b>3</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Outcome</b>	<b>:</b>	<b>Persentase UTTP yang ditera /tera ulang dan diawasi</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
	1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Output	:	Persentase UTTP yang diTera/Tera Ulang dan diawasi	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>









## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disperindag Kab.Tabanan**

Mengacu pada Misi Pembangunan daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 khususnya Misi ke-3 dinyatakan secara jelas, bahwa Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)

Misi 3 (tiga) ini didukung oleh 1 (satu) tujuan dengan 4 (empat) sasaran antara lain :

Tujuan : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan

Dengan sasaran :

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat
- b. Sasaran 2 : Terwujudnya Ketersediaan Pangan Utama
- c. Sasaran 3 : Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang Memanfaatkan Potensi Lokal
- d. Sasaran 4 : Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Masyarakat yang Bersumber dari Potensi Seni dan Budaya

untuk memajukan Kabupaten Tabanan, salah satu upaya yang dilakukan adalah Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pangan, Sandang, Dan Papan.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian petani dan kedaulatan pangan, meningkatkan keterkaitan hulu hilir UMKM dan mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat. Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain, Sasaran Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD). Kemudian dibentuk Sasaran Kinerja Utama yang menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik dan sesuai bidang layanan Perangkat Daerah (PD). Dilihat dari target sampai akhir periode (tahun 2021) maka capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan tahun 2021. Didalam upaya

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan , maka pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tetap berpedoman pada indikator kinerja. Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat dari sejauh mana pencapaian dari setiap indikator kinerja pelayanan RPJMD, maupun pencapaian realisasi anggaran.

Sebagai salah satu Dinas yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan bisa dikatakan sebagai Dinas yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Tabanan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. Upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan, dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pelayanan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan terutama dalam **Indikator Kinerja Utama (IKU)** PD. Indikator utama yang telah tercapai adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.2. Pencapaian kinerja Disperindag Tabanan tahun 2021 merupakan pencapaian atas target kinerja Disperindag Tabanan tahun 2021-2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini

indikator sasaran/target Renstra Dinas Perindag dilihat pada tabel 2.2 seperti dibawah ini:

### **Tabel 2.2**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Tabanan

NO	Indikator Kinerja sesuai fungsi dan tugas PD	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun						Proyeksi Capaian						Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terlaksananya Reformasi Birokrasi		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
2	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan yang berdaya saing		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan yang layak sehingga mampu bersaing dengan toko modern
3	Meningkatnya tertib ukur		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Meningkatnya tertib ukur menindaklanjutinya, perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif, Pelayanan Tera/Tera Ulang belum maksimal dapat dilaksanakan karena keterbatasan alat pengukuran
4	Meningkatnya komoditi unggulan daerah yang dipromosikan		1 Event	1 Event	1 Event	1 Event	1 Event	1 Event	1 Event	1 Event	1 Event	1 Event	1 Event	1 Event	Meningkatnya jumlah komoditi unggulan Tabanan yang dipasarkan dengan ikut serta dalam acara seperti pameran, perayaan HUT kota
5	Tercapainya Peningkatan Daya Saing Industri Melalui Peningkatan Kualitas Produk Untuk Menumbuhkembangkan Industri Kecil		1,03%	1,52%	1,99%	2,42%	2,83%	3,19	1,03%	1,99%	1,99%	2,42%	2,83%	3,19	Pengembangan IKM bertujuan untuk menumbuhkembangkan industri tersebut sehingga mampu memperkuat struktur industri yang ada dan menjaga stabilitas perekonomian bangsa. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang



Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan pasar dalam bentuk pengelolaan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten tabanan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Setiap tahun ditentukan target pendapatan yang diharapkan dapat tercapai. Agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal, diupayakan langkah-langkah strategis yang diharapkan dapat memacu optimalisasi pendapatan daerah antara lain melalui :

- a. Peningkatan kinerja dan aparat pelaksana pendapatan.
- b. Ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan.
- c. Sosialisasi Perda tentang retribusi.
- d. Pemanfaatan aset-aset yang dimiliki secara efektif dan efisien.
- e. Peningkatan koordinasi dengan dinas/instansi terkait maupun pihak ketiga.

Pendapatan pasar hampir selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun nilainya relatif kecil. Hal ini disebabkan karena jumlah pedagang, los, kios di pasar relatif sama. Peningkatan penerimaan retribusi dari tahun ke tahun berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan dapat memperkuat posisi keuangan daerah. Selain di bidang pendapatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Bidang Pasar mempunyai tugas dalam pemeliharaan dan pengembangan pasar, pengelolaan data pedagang pasar serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban pasar. Pemeliharaan dan pengembangan pasar diupayakan melalui peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan pasar, yang setiap tahunnya selalu mengalami penyempurnaan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan pasar selalu diinventarisir dan ditindaklanjuti dengan melengkapi fasilitas yang dianggap belum memadai. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menunjang perwujudan pasar yang representatif, sehingga keberadaan pasar tradisional tetap lestari dan tidak akan tergeser oleh toko-toko modern disamping melindungi kepentingan masyarakat ekonomi lemah. Permasalahan yang terkait dengan pembinaan dan penataan pedagang dapat diselesaikan dengan baik meskipun ada beberapa hambatan yang terjadi. Permasalahan yang menyangkut kepentingan publik dalam jumlah besar memang sering dialami pada saat penempatan maupun penataan pedagang, hal tersebut masih dapat diatasi melalui upaya pendekatan secara persuasif kepada pedagang.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disperindag Kab.Tabanan**

Peran dan posisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dengan PD dalam lingkup Provinsi Bali maupun kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dengan potensi yang begitu besar yang ada di Kabupaten Tabanan mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia yang sangat potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum bisa mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat di Kabupaten Tabanan.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Perindag. Perlu digaris bawahi pula berkaitan dengan kondisi riil pelaku usaha bahwa kualitas SDM pelaku usaha bidang perindustrian dan perdagangan masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi, dan pemasaran pun masih lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah. Hal ini merupakan tantangan khususnya dalam upaya memenangkan kompetisi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN serta percaturan ekonomi global pada umumnya.

Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Kondisi ini didukung oleh adanya minat investor di bidang industri dan perdagangan yang cukup tinggi. Tentunya keselarasan program dan kerjasama lintas sektor sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya industri dan perdagangan di Kabupaten Tabanan.

Sebenarnya di Kabupaten Tabanan ada beberapa produk yang punya potensi untuk ditingkatkan dalam pangsa pasar nasional dan internasional selain Besi dan Keramik,. Beberapa produk itu mempunyai daya saing tinggi, sifat kekhasan daerah, kualitas produk dan kualitas yang baik diantaranya : Kopi, Olahan Manggis, kelapa dll.



Untuk meningkatkan daya saing produk – produk unggulan kabupaten Tabanan, juga dikembangkan forum – forum komunikasi dan forum diskusi antar lembaga yang berorientasi terhadap pengembangan ekonomi daerah sebagai stakeholders daerah dalam pengembangan ekonomi diantaranya yaitu Dekranasda, HIMKI, KADIN, ASHEPI, dll.

Namun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terdapat permasalahan yang di hadapi, yaitu :

### **Perdagangan**

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perdagangan di Tabanan adalah:

- a) Sarana dan prasarana pasar bagi distribusi produk UMKM masih terbatas, baik jumlah maupun kualitas pasar yang telah ada.
- b) Belum optimalnya informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- c) Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional
- d) Kurangnya promosi produk unggulan Kabupaten Tabanan di pasar lokal, nasional maupun internasional;
- e) Jumlah dan nilai produk ekspor dari Kabupaten Tabanan masih sangat rendah.
- f) Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Tabanan cenderung mengganggu keindahan dan kenyamanan kota.
- g) Belum optimalnya penantauan peredaran barang berbahaya pangan yang ada di Kabupaten Tabanan;
- h) Belum optimalnya pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ualng dan Pengawasan, yang ditunjukkan dengan rendahnya jumlah UTTP yang di Tera / Tera Ulang;
- i) Sinergi program antara Perangkat Daerah yang menangani produksi dan Perangkat Daerah yang menangani perdagangan belum terjalin secara baik.
- j) Belum Optimalnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen yng ditunjukkan dengan UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku.

### **Perindustrian**

Sama halnya dengan perdagangan, disektor industri juga belum memberikan kontribusi positif pada perkembangan pertanian sebagai sektor unggulan. Perlu upaya yang serius dalam mengembangkan industri yang berbasis pertanian. Pengembangan perindustrian di Tabanan menghadapi beberapa tantangan dari permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a) Lemahnya fasilitasi dan atau pemberian insentif bagi penumbuhan industri berbasis produk pertanian.
- b) Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana layanan teknis IKM untuk meningkatkan daya saing
- c) IKM yang berijin jumlahnya relatif kecil.
- d) Belum Optimalnya Pengembangan Industri Kecil Menengah
- e) Masih terbatasnya kemampuan inovasi pelaku industri kecil sehingga daya saing mereka masih lemah.
- f) Industri yang telah memiliki sertifikasi standar kelayakan produk masih terbatas.
- g) Belum adanya regulasi Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK).

Permasalahan Strategis yang dihadapi dalam pembinaan Perindustrian dan Perdagangan saat ini antara lain :

- a) Belum optimalnya pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ualng dan Pengawasan;
- b) Belum optimalnya informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- c) Rendahnya pertumbuhan dan perkembangan industri kecil dan menengah (ikm) berbasis komoditas unggulan daerah ;
- d) Perlunya revitalisasi pasar rakyat dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan dan pergerakan tingkat kestabilan harga atau inflasi domestik.

Dengan banyaknya permasalahan yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan, maka bisa berdampak pada pencapaian visi misi kepala daerah yang sudah ditentukan. Karena dalam menyelesaikan berbagai masalah tersebut diperlukan kerja keras dan juga biaya yang sangat banyak, sedangkan “anggaran yang tersedia sangat minim.

Isu strategis dalam Rencana Strategis Disperindag Kabupaten Tabanan antara lain:

- Pembangunan Perdagangan dan Perindustrian menuju pada pencapaian industrialisasi yang mendukung pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian dalam arti luas, khususnya terhadap komoditi unggulan Kabupaten Tabanan

- Pembangunan Kabupaten Tabanan menuju daerah agro industri yang tangguh, maka produsen hasil-hasil pertanian tidak akan banyak terpengaruh oleh adanya gejolak yang diakibatkan oleh antara lain : merosotnya nilai rupiah, adanya globalisasi perdagangan dan gangguan keamanan nasional.
- Pembangunan Kabupaten Tabanan menitik beratkan pada pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai daerah “lumbung beras” dan bersinergi dengan pembangunan pariwisata secara berkelanjutan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Sehingga hal hal yang harus dilakukan oleh Disperindag didalam meningkatkan kinerja Pelayanan PD serta pencapaian Misi dan Visi Bupati Tabanan maka sasaran yang diharapkan atas Isu Strategis Disperindag Kabupaten Tabanan adalah:

- Terlaksananya reformasi birokrasi ( indicator : Nilai LKJP )
- Meningkatnya sarana distribusi perdagangan yang berdaya saing ( Indikator : Persentase bangunan pasar rakyat yang layak, terfasilitasi dan terawasi )
- Meningkatnya komoditi unggulan daerah yang dipromosikan ( Indikator : Terlaksananya Promosi Produk Unggulan Kabupaten Tabanan)
- Meningkatnya daya saing industri melalui peningkatan kualitas produk untuk menumbuh kembangkan industri kecil ( Indikator : Persentase peningkatan dan pertumbuhan IKM )
- 

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Pada Tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan mengusulkan beberapa program kegiatan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan program kegiatan diperlukan dana dari APBD melalui Renja Tahun 2022. Tapi karena keterbatasan anggaran yang tersedia dari usulan yang ada dilakukan analisis sesuai dengan kebutuhan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan

dengan Bappelitbang Kabupaten Tabanan. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 pada Disperindag Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut.

**Tabel 2.3**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan Kabupaten Tabanan

NO	KODE REKENING	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING		
		PROGRAM /KEGIATAN	LO KASI	INDIKATOR KINERJA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LO KASI	INDIKATOR KINERJA		TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana			
3.30.		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						<b>10.580.610.506</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						<b>10.625.203.373</b>	
I	3.30.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Kab Tab.	Output	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	100 %	<b>10.035.610.657</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Kab Tab.	Output	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	100 %	<b>8.204.916.673</b>	*		
1	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tab.	output	Jumlah Dokumen Sakip Yang Tersedia	1A	4.999.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tab.	output	Jumlah Dokumen Sakip Yang Tersedia	1A	5.000.000			
	3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tab.	output	Tersusunnya Dokumen LKJIP	1 Jenis Dokumen	2.999.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tab.	output	Tersusunnya Dokumen LKJIP	1 Jenis Dokumen	3.000.000			
	3.30.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tab.	output	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja	2 Jenis Dokumen	1.999.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tab.	output	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja	2 Jenis Dokumen	2.000.000			

2	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tab.	output	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran	100%	7.049.012.806	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tab.	output	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran	100%	7.149.240.762	
	3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tab.	output	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	7.044.013.306	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tab.	output	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	7.144.240.962	
	3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Kab. Tab.	output	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	2 Jenis Dokumen	4.999.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Kab. Tab.	output	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	2 Jenis Dokumen	5.000.000	
3	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tab.	output	Lancarnya Administrasi Perkantoran	100%	427.764.750	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tab.	output	Lancarnya Administrasi Perkantoran	100%	164.500.000	
	3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	1.992.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	2.000.000	
	3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	3.498.300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	3.500.000	
	3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	168.207.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	60.000.000	
	3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	78.846.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	10.000.000	

	3.30.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100 %	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100 %	3.000.000	
	3.30.01.2 .06.07	Penyediaan Bahan Material	Kab Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Material	100 %	93.644.050	Penyediaan Bahan Material	Kab Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Material	100 %	31.000.000	
	3.30.01.2 .06.09	Rapat - Rapat Kordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Kab Tab.	output	Terlaksananya kebutuhan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100 %	78.576.000	Rapat - Rapat Kordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Kab Tab.	output	Terlaksananya kebutuhan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100 %	55.000.000	
<b>4</b>	3.30.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Tab	Output	Lancarnya Administrasi Perkantoran	1A	99.410.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Tab	Output	Lancarnya Administrasi Perkantoran	1A	100.000.000	
	3.30.01.2 .07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tab	Output	Persentase Terpenuhiya kebutuhan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	99.410.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tab	Output	Persentase Terpenuhiya kebutuhan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100.000.000	
<b>5</b>	3.30.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Tab	output	Lancarnya Administrasi Perkantoran	1A	2.261.516.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Tab	output	Lancarnya Administrasi Perkantoran	1A	614.175.711	
	3.30.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tab.	output	Terpenuhiya Kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tab.	output	Terpenuhiya Kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	2.000.000	
	3.30.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber, Sumber	Kab Tab.	output	Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	114.997.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber, Sumber	Kab Tab.	output	Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	90.000.000	

		Daya Air dan Listrik						Daya Air dan Listrik						
	3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tab.	output	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	2.144.519.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tab.	output	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	522.175.711	
6	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tab.	Output	Lancarnya Administrasi Perkantoran	100 %	192.906.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tab.	Output	Lancarnya Administrasi Perkantoran	100 %	172.000.000	
	3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tab.	Output	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	81.456.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tab.	Output	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	60.500.000	
	3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tab.	Output	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	6.960.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tab.	Output	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	7.000.000	
II	3.30.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI</b>		<b>Output</b>	<b>Presentase bangunan pasar rakyat yang layak, terfasilitasi dn terawasi</b>	100 %	350.000.000	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI</b>		<b>Output</b>	<b>Presentase bangunan pasar rakyat yang layak, terfasilitasi dn terawasi</b>	100 %	2.220.216.700	



		<b>PERDAGANGAN</b>						<b>PERDAGANGAN</b>						
<b>11</b>	3.30.03.2.01	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi Perdagangan	Kab. Tab.	output	Presentase Sarana Distribusi Perdagangan yang terfasilitasi dan terawasi	15 pasar	350.000.000	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi Perdagangan	Kab. Tab.	output	Presentase Sarana Distribusi Perdagangan yang terfasilitasi dan terawasi	15 pasar	2.220.216.700	
	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tab.	output	Persentase sarana Distribusi Perdagangan yang terrevitalisasi	15 pasar	350.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Tab.	output	Persentase sarana Distribusi Perdagangan yang terrevitalisasi	15 pasar	2.220.216.700	
<b>16</b>	3.30.06.	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Kab. Tab.</b>	<b>Outcome</b>	<b>Persentase UTTP yang ditera /tera ulang dan diawasi</b>	<b>20%</b>	74.999.850	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Kab. Tab.</b>	<b>Outcome</b>	<b>Persentase UTTP yang ditera /tera ulang dan diawasi</b>	<b>20%</b>	76.950.000	
	3.30.06.2.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Tab.	output	Persentase UTTP yang diTera/Tera Ulang dan diawasi	20%	49.999.900	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Tab.	output	Persentase UTTP yang diTera/Tera Ulang dan diawasi	20%	51.950.000	
	3.30.06.2.01.03	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Tab.	output	Persentase UTTP dan pelaku usaha yang diawasi	20%	24.999.950	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Tab.	output	Persentase UTTP dan pelaku usaha yang diawasi	20%	25.000.000	
<b>VII</b>	<b>3.30.07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN</b>	<b>Kab. Tab.</b>	<b>output</b>	<b>Persentase Komuditi Hasil Pertanian yang Mampu Difasilitasi Dalam Pemasaran</b>	<b>100%</b>	<b>120.000.000</b>	<b>Penyidikan Metrologi Legal</b>	<b>Kab. Tab.</b>	<b>output</b>	<b>Persentase Komuditi Hasil Pertanian yang Mampu Difasilitasi Dalam Pemasaran</b>	<b>100%</b>	<b>123.120.000</b>	

		<b>PRODUK DALAM NEGERI</b>												
<b>17</b>	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Tab.	output	Terlaksananya Promosi, produk unggulan kabupaten tabanan	1 event	<b>120.000.000</b>	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Tab.	output	Terlaksananya Promosi, produk unggulan kabupaten tabanan	1 event	123.120.000	
	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tab.	output	Terlaksananya Promosi, penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten kota	1 event	<b>120.000.000</b>	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tab.	output	Terlaksananya Promosi, penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten kota	1 event	123.120.000	
	<b>3,31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>					<b>25.957.499.900</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>					<b>773.706.600</b>	
<b>VIII</b>	<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Kab. Tab.</b>	<b>Output</b>	<b>Persentase Pengusaha Industri Kreatif Yang Berkembang</b>	2%	<b>25.957.499.900</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Kab. Tab.</b>	<b>Output</b>	<b>Persentase Pengusaha Industri Kreatif Yang Berkembang</b>	2%	<b>773.706.600</b>	
<b>18</b>	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Tab.	Output	Persentase Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100%	<b>25.957.499.900</b>	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Tab.	Output	Persentase Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100%	<b>773.706.600</b>	

	3.31.02.2 .01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dan pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan Perwilayah an Industri	Kab .Tab .	Out put	Tersusunnya dokumen tentang pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan Perwilayah an Industri	100 %	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dan pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan Perwilayah an Industri	Kab .Tab .	Out put	Tersusunnya dokumen tentang pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan Perwilayah an Industri	100 %	110.000.000	
	3.31.02.2 .01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab .Tab .	Out put	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100 %	25.487.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab .Tab .	Out put	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100 %	265.000.000	
	3.31.02.2 .01.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab .Tab .	Out put	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	100 %	369.999.900	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab .Tab .	Out put	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	100 %	398.706.600	
						-	<b><u>36.538.110.406</u></b>					-	<b><u>11.398.902.973</u></b>	

\* Catatan Penting Rancangan Akhir dengan Hasil Analisis kebutuhan , untuk sementara Usulan Kebutuhan Dananya Adalah sama Rp 36.538.110.406 ( Kebutuhan Dana serta peogram/kegiatan/sub kegiatan akan mengalami perubahan untuk tahapan renja berikutnya menyesuaikan PAGU yang tersedia beserta hasil Forum OPD dan Musrenbang

Program :

5

Kegiatan :

11

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi perencanaan PD saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perindustrian dan perdagangan, sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan. Dengan usulan dari MUSRENBANG tingkat kecamatan yang berjumlah 10 kecamatan yang meliputi pelatihan ketrampilan industri serta pembangunan dan rehabilitasi pasar. Dengan usulan tersebut tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan , seperti tersaji dalam Tabel T-C. 3.2.

Tabel 2.4

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku  
kepentingan tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Tabanan



Tabel 2.4  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022 KABUPATEN TABANAN**

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			BESARAN/VOLUME	CATATAN
	<b>3.30.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					<b>10.580.610.506</b>	
<b>I</b>	<b>3.30.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Kab Tab.</b>	<b>Outcom e</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>10.035.610.656</b>	
	<b>1</b>	<b>3.30.01.2.01</b>	<b>Kab Tab.</b>	<b>output</b>	<b>Jumlah Dokumen Sikip Yang Tersedia</b>	<b>1A</b>	<b>4.999.700</b>	
		3.30.01.2.01.01	Kab Tab.	output	Tersusunnya Dokumen LKJIP	1 Jenis Dokumen	2.999.800	
		3.30.01.2.01.05	Kab Tab.	output	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja	2 Jenis Dokumen	1.999.800	
	<b>2</b>	<b>3.30.01.2.02</b>	<b>Kab Tab.</b>	<b>output</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Keuangan Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>7.049.012.806</b>	
		3.30.01.2.02.01	Kab Tab.	output	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	7.044.013.306	
		3.30.01.2.02.07	Kab Tab.	output	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	2 Jenis Dokumen	4.999.500	
	<b>3</b>	<b>3.30.01.2.06</b>	<b>Kab Tab.</b>	<b>output</b>	<b>Lancarnya Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>427.764.750</b>	

		3.30.01.2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	1.992.000	
		3.30.01.2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	3.498.300	
		3.30.01.2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	168.207.500	
		3.30.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	78.846.900	
		3.30.01.2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	3.000.000	
		3.30.01.2.06.0 7	Penyediaan Bahan Material	Kab Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Material	100%	93.644.050	
		3.30.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tab.	output	Terlaksananya kebutuhan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	78.576.000	
	<b>4</b>	<b>3.30.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab Tab</b>	<b>Output</b>	<b>Lancarnya Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>99.410.000</b>	
		3.30.01.2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tab	Output	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	99.410.000	
	<b>5</b>	<b>3.30.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab Tab</b>	<b>Output</b>	<b>Lancarnya Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>2.261.516.700</b>	
		3.30.01.2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tab	Output	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2.000.000	
		3.30.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Tab	Output	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	114.997.500	
		3.30.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Tab	Output	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	2.144.519.200	



	<b>6</b>	<b>3.30.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab Tab</b>	<b>Output</b>	<b>Lancarnya Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>192.906.800</b>
		3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Tab	Output	Persentase Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pejinaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100%	81.456.300
		3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab Tab	Output	Terpeliharanya gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	6.960.000
	<b>II</b>	<b>3.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>Outcom e</b>	<b>Presentase bangunan pasar rakyat yang layak, terfasilitasi dn terawasi</b>	<b>100%</b>	<b>350.000.000</b>
	<b>7</b>	<b>3.30.03.2.01</b>	<b>Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi Perdagangan</b>	<b>Kab Tab.</b>	<b>output</b>	<b>Presentase Sarana Distribusi Perdagangan yang terfasilitasi dan terawasi</b>	<b>100%</b>	<b>350.000.000</b>
		3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab Tab.	output	Persentase sarana Distribusi Perdagangan yang terrevitalisasi	100%	350.000.000
	<b>III</b>	<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Kab Tab.</b>	<b>Outcom e</b>	<b>Persentase UTP yang ditera /tera ulang dan diawasi</b>	<b>20%</b>	<b>74.999.850</b>
	<b>9</b>	<b>3.30.06.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>Kab.Tab</b>	<b>output</b>	<b>Persentase UTP yang diTera/Tera Ulang dan diawasi</b>	<b>20%</b>	<b>74.999.850</b>
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Kab.Tab	output	Persentase UTP yang bertanda tera sah dan berlaku	20%	49.999.900
		3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab.Tab	output	Persentase UTP dan pelaku usaha yang diawasi	20%	24.999.950
	<b>IV</b>	<b>3.30.07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Kab Tab.</b>	<b>Outcom e</b>	<b>Terlaksananya Promosi, produk unggulan kabupaten tabanan</b>	<b>1 event</b>	<b>120.000.000</b>

	10	3.30.07.2.01	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	Kab.Tab.	output	<b>Terlaksananya Promosi, produk unggulan kabupaten tabanan</b>	1 event	120.000.000
		3.30.07.2.01.01	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Ditingkat Kabupaten/Kota	Kab.Tab.	output	Terlaksananya Pemasaran Produk Unggulan Daerah	1 event	120.000.000
		<b>3,31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>					<b>25.957.499.900</b>
V		<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Kab.Tab.	Outcom e	<b>Persentase Pengusaha Industri Kreatif Yang Berkembang</b>	2%	25.957.499.900
	11	3.31.02.2.01	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	Kab.Tab.	Output	<b>Persentase Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	100%	25.957.499.900
		3.31.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dan pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab.Tab.	Output	Tersusunnya dokumen tentang pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan Perwilayahan Industri	100%	100.000.000
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kab.Tab.	Output	Meningkatnya Industri Kreatif yang berkembang	20 IKM	25.487.500.000
		3.31.02.2.01.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab.Tab.	Output	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	100%	369.999.900

<b>TOTAL USULAN URUSAN PERDAGANGAN DAN URUSAN PERINDUSTRIAN</b>	<b><u>36.538.110.406</u></b>	
---	------------------------------	--







**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN TABANAN**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaah Renstra Kementerian Perindustrian dan Perdagangan

Dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan Tahun 2022 telah menyinkronkan dengan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2021-2026 yaitu :

Permasalahan Pelayanan Opd Berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong

Faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan OPD (Dinas Perindag Kabupaten Tabanan) ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat

- a. Industri dasar yang menjadi pemasok bahan baku kemampuannya masih terbatas.
- b. Penerapan standar produk komponen dan bahan baku yang tersedia di pasar dalam negeri tidak atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- c. Belum kuatnya peranan Industri kecil dan menengah.
- d. Ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi dan beberapa Negara tujuan

2. Faktor Pendorong

- a. Potensi sumber daya alam Indonesia sangat potensial untuk menumbuhkan kembangkan industri dan perdagangan berbasis sumber daya alam.
- b. Jumlah SDM Sektor industri dan perdagangan relative besar.
- c. Investasi mendorong impor teknologi.
- c. Adanya komitmen dan konsisten untuk terus melakukan perbaikan iklim usaha.

**3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi**

**3.2.1 Telaahan Kementerian Perdagangan**

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan

informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Untuk itu, Kementerian Perdagangan RI dituntut memiliki kemampuan menjembatani kesenjangan yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tercantum dalam Undang-Undang 7 tahun 2007 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. RPJPN 2005-2015 dilaksanakan dalam 4 tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), yang pada tahap 3 atau dalam periode 2015-2019 memiliki arah kebijakan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Berdasarkan arahan tersebut pembangunan Indonesia dalam periode ini diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu peran penting Kementerian Perdagangan dalam agenda pembangunan sektor ekonomi adalah melakukan upaya peningkatan ekspor non migas dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Strategi dalam mewujudkan arah kebijakan peningkatan ekspor produk non migas dan ekspor jasa bernilai tambah lebih tinggi dan lebih kompetitif di pasar internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ekspor barang bernilai tambah lebih tinggi;
2. Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasa prioritas yang meliputi jasa pendorong ekspor non migas (jasa transportasi, jasa pariwisata dan jasa konstruksi) serta jasa yang mendukung fasilitasi perdagangan dan produktivitas ekonomi (jasa logistik, jasa distribusi dan jasa keuangan).

Visi Kementerian Perdagangan yakni : “Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan



Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Sesuai dengan amanat Presiden agar setiap Kementerian/Lembaga memiliki Misi yang sama dengan Presiden. Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020 – 2024 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut : Misi 1 “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”, Misi 2 “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”, Misi 3 “Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan” Misi 4 “Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”, Misi 5 “Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa”, Misi 6 “Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”, Misi 7 “Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga”, Misi 8 “Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”, Misi 9 “Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan”

### 3.2.2 Telaahan Kementerian Perindustrian

Visi Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 ialah ” “Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam dan Berkeadilan” . Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing. Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan dijelaskan pada bagian Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, kebijakan-kebijakan yang diambil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan harus mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali tahun 2019 – 2023. Visi Kementerian Perindustrian yakni : “Menjadikan Indonesia sebagai negara industri tangguh yang memiliki struktur industri yang kuat , dalam, sehat dan berkeadilan, berdaya saing tinggi, berbasis inovasi dan teknologi.”. Dalam Visi ini, mengandung beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Kementerian Perindustrian :

1. Mewujudkan Kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik
2. Mewujudkan penguatan struktur industri yang mandiri, sehat dan berdaya saing.
3. Mewujudkan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan.
4. Mewujudkan Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) sebagai basis industri nasional yang terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri berskala besar.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Sedangkan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan OPD (Dinas Perindag Kabupaten Tabanan) ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut :

#### 1. Faktor Penghambat

- a. Industri dasar yang menjadi pemasok bahan baku kemampuannya masih terbatas.
- b. Penerapan standar produk komponen dan bahan baku yang tersedia di pasar dalam negeri tidak atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- c. Belum kuatnya peranan Industri kecil dan menengah.
- d. Ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi dan beberapa Negara tujuan

#### 2. Faktor Pendorong

- a. Potensi sumber daya alam Indonesia sangat potensial untuk menumbuhkan kembangkan industri dan perdagangan berbasis sumber daya alam.

- b. Jumlah SDM Sektor industri dan perdagangan relative besar.
- c. Investasi mendorong impor teknologi.
- c. Adanya komitmen dan konsisten untuk terus melakukan perbaikan iklim usaha.

### **3.3 Tujuan dan Sasaran renja Disperindag Kabupaten Tabanan**

#### **3.3.1 Tujuan**

“Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada fokus visi dan misi pembangunan daerah selama lima tahun kedepan sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari tujuan. Sedangkan, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator. haruslah *Specific, Measurable Achievable, Relevant, dan Time Bond*.

Mengacu pada pendekatan pembangunan, landasan nilai kearifan lokal, kondisi saat ini serta tantangan masa depan, maka visi pembangunan lima tahun ke depan Tahun 2021-2026 “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (Aum)”.

Sebagai penjabaran visi pembangunan tabanan 2021-2026, maka misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah : “Pembangunan yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas : Pangan, Sandang, Dan Papan, Pendidikan Dan Kesehatan, Jaminan Sosial, Dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya, dan Pariwisata”

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
2. Terwujudnya daya saing pelaku usaha perdagangan
3. Terwujudnya pertumbuhan dan daya saing industri kecil dan menengah berbasis komoditas unggulan daerah.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yang berbunyi “Terwujudkan masyarakat Tabanan yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan sradha, ilmu, dan teknologi yang berperadaban budaya Bali (Madani)”.

### 3.2.2 Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan Disperindag , maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan menetapkan lima sasaran strategis :

1. Terlaksananya Reformasi Birokrasi
2. Meningkatnya sarana distribusi perdagangan yang berdaya saing
3. Meningkatnya tertib ukur
4. Meningkatnya komoditi unggulan daerah yang dipromosikan
5. Meningkatnya daya saing industri melalui peningkatan kualitas produk untuk menumbuh kembangkan industri kecil.

### 3.1 Program dan Kegiatan

Visi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Periode Tahun 2021 – 2026 adalah “ **NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)** “ dimana visi tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi utama yaitu : Terpeliharanya keseimbangan alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali),Terpenuhinya Kebutuhan, Harapan , dan Aspirasi Krama dalam berbagai aspek kehidpuan. Memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasic/ menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran local, Nasional , dan Global yang akan berdampak secara positif maupun negative terhadap kondisi di masa yang akan datang.Dimana Program tersebut nantinya menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program

berorientasi pada *outcome*. Ditataran teknis operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian *output*. Untuk mencapai sasaran, Program dapat terdiri lebih dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pencapaian target sasaran.

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh SKPD maupun Pemerintah Daerah. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan seperti yang telah diuraikan diatas dijabarkan dalam 5 program yang akan dilaksanakan di tahun 2023 melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung. Program tersebut diwadahi dalam urusan perindustrian dan urusan perdagangan .Program dan Kegiatan yang diusulkan pada rencana kegiatan tahun 2023 adalah:

- 5 Program
- 11 Kegiatan
- 26 Sub kegiatan

Tabel 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 KABUPATEN TABANAN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TABANAN



KODE	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)		Rencana Tahun 2023 ( Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
	1	2	3	4	5	6		7	8	9			
<b>3.30.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				<b>10.580.610.506</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				<b>10.625.203.373</b>			
<b>I</b>	<b>3.30.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Kab Tab.</b>	<b>Out come</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>10.035.610.657</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Kab Tab.</b>	<b>Out come</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>8.204.916.673</b>
<b>1</b>	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tab.	out put	Jumlah Dokumen Sakip Yang Tersedia	1A	4.999.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tab.	out put	Jumlah Dokumen Sakip Yang Tersedia	1A	5.000.000
	3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab Tab.	out put	Tersusunnya Dokumen LKJIP	1 Jenis Dokumen	2.999.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kab Tab.	out put	Tersusunnya Dokumen LKJIP	1 Jenis Doku	3.000.000

		Perangkat Daerah						n Perangkat Daerah				men	
	3.30.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tab.	out put	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja	2 Jenis Dokumen	1.999.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tab.	out put	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja	2 Jenis Dokumen	2.000.000
<b>2</b>	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Tab.	out put	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran	100%	7.049.012.806	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Tab.	out put	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perkantoran	100%	7.149.240.762
	3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tab.	out put	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	7.044.013.306	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tab.	out put	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	7.144.240.962
	3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Kab Tab.	out put	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	2 Jenis Dokumen	4.999.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Kab Tab.	out put	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	2 Jenis Dokumen	5.000.000
<b>3</b>	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Tab.	out put	Lancarnya Administrasi Perkantoran	100%	427.764.750	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Tab.	out put	Lancarnya Administrasi Perkantoran	100%	164.500.000
	3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Tab.	out put	Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	1.992.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Tab.	out put	Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	2.000.000
	3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Tab.	out put	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	3.498.300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Tab.	out put	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	3.500.000
	3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Tab.	out put	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	168.207.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Tab.	out put	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	60.000.000



	3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Tab.	out put	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	78.846.900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Tab.	out put	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	10.000.000
	3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab Tab.	out put	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab Tab.	out put	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	3.000.000
	3.30.01.2.06.07	Penyediaan Bahan Material	Kab Tab.	out put	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Material	100%	93.644.050	Penyediaan Bahan Material	Kab Tab.	out put	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Material	100%	31.000.000
	3.30.01.2.06.09	Rapat - Rapat Kordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Kab Tab.	out put	Terlaksananya kebutuhan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	78.576.000	Rapat - Rapat Kordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Kab Tab.	out put	Terlaksananya kebutuhan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	55.000.000
<b>4</b>	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Tab	Out put	Lancarnya Administrasi Perkantoran	1A	99.410.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Tab	Out put	Lancarnya Administrasi Perkantoran	1A	100.000.000
	3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tab	Out put	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	99.410.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tab	Out put	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100.000.000
<b>5</b>	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Tab	out put	Lancarnya Administrasi Perkantoran	1A	2.261.516.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Tab	out put	Lancarnya Administrasi Perkantoran	1A	614.175.711

	3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tab.	out put	Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tab.	out put	Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2.000.000
	3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Tab.	out put	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	114.997.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Tab.	out put	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	90.000.000
	3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Tab.	out put	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	2.144.519.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Tab.	out put	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	522.175.711
<b>6</b>	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Tab	Out put	Lancarnya Administrasi Perkantoran	100%	192.906.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Tab	Out put	Lancarnya Administrasi Perkantoran	100%	172.000.000
	3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Tab	Out put	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	81.456.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Tab	Out put	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	60.500.000
	3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kab Tab	Out put	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	4.490.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kab Tab	Out put	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	4.500.000

			Operasional/Lapangan					Operasional/Lapangan						
		3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tab	Out put	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	6.960.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Tab	Out put	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	7.000.000
		3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Tab	Out put	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Tab	Out put	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100.000.000
<b>II</b>		<b>3.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>Out come</b>	<b>Presentase bangunan pasar rakyat yang layak, terfasilitasi dn terawasi</b>	100%	350.000.000	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>Out come</b>	<b>Presentase bangunan pasar rakyat yang layak, terfasilitasi dn terawasi</b>	100%	2.220.216.700
	<b>11</b>	3.30.03.2.01	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi Perdagangan	Kab Tab.	out put	Presentase Sarana Distribusi Perdagangan yang terfasilitasi dan terawasi	15 pasar	350.000.000	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi Perdagangan	Kab Tab.	out put	Presentase Sarana Distribusi Perdagangan yang terfasilitasi dan terawasi	15 pasar	2.220.216.700
		3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab Tab.	out put	Persentase sarana Distribusi Perdagangan yang terrevitalisasi	15 pasar	350.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab Tab.	out put	Persentase sarana Distribusi Perdagangan yang terrevitalisasi	15 pasar	2.220.216.700
	<b>16</b>	3.30.06.	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN</b>	<b>Kab Tab.</b>	<b>Out come</b>	<b>Persentase UTTP yang ditera /tera ulang dan diawasi</b>	<b>20%</b>	74.999.850	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN</b>	<b>Kab Tab.</b>	<b>Out come</b>	<b>Persentase UTTP yang ditera /tera ulang dan diawasi</b>	<b>20%</b>	76.950.000

			<b>KONSUMEN</b>						<b>KONSUMEN</b>					
		3.30.06.2.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab.Tab	out put	Persentase UTTP yang diTera/Tera Ulang dan diawasi	20%	49.999.900	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab.Tab	out put	Persentase UTTP yang diTera/Tera Ulang dan diawasi	20%	51.950.000
		3.30.06.2.01.03	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab.Tab	out put	Persentase UTTP dan pelaku usaha yang diawasi	20%	24.999.950	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab.Tab	out put	Persentase UTTP dan pelaku usaha yang diawasi	20%	25.000.000
<b>VII</b>	<b>3.30.07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Kab.Tab</b>	<b>out put</b>	<b>Persentase Komuditi Hasil Pertanian yang Mampu Difasilitasi Dalam Pemasaran</b>	<b>100%</b>	<b>120.000.000</b>	<b>Penyidikan Metrologi Legal</b>	<b>Kab.Tab</b>	<b>out put</b>	<b>Persentase Komuditi Hasil Pertanian yang Mampu Difasilitasi Dalam Pemasaran</b>	<b>100%</b>	<b>123.120.000</b>	
<b>17</b>	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab Tab.	out put	Terlaksananya Promosi, produk unggulan kabupaten tabanan	1 event	<b>120.000.000</b>	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab Tab.	out put	Terlaksananya Promosi, produk unggulan kabupaten tabanan	1 event	123.120.000	
	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Tab.	out put	Terlaksananya Promosi, penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten kota	1 event	<b>120.000.000</b>	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Tab.	out put	Terlaksananya Promosi, penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten kota	1 event	123.120.000	

		<b>3,31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>25.957.499.900</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>773.706.600</b>		
<b>VIII</b>		<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Kab.Tab</b>	<b>Out come</b>	<b>Persentase Pengusaha Industri Kreatif Yang Berkembang</b>	<b>2%</b>	<b>25.957.499.900</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Kab.Tab</b>	<b>Out come</b>	<b>Persentase Pengusaha Industri Kreatif Yang Berkembang</b>	<b>2%</b>	<b>773.706.600</b>
<b>18</b>		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab.Tab	Output	Persentase Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100%	<b>25.957.499.900</b>	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab.Tab	Output	Persentase Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100%	<b>773.706.600</b>
		3.31.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dan pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab.Tab	Output	Tersusunnya dokumen tentang pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan Perwilayahan Industri	100%	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dan pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab.Tab	Output	Tersusunnya dokumen tentang pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan Perwilayahan Industri	100%	110.000.000
		3.31.02.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab.Tab	Output	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100%	25.487.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab.Tab	Output	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100%	265.000.000

		3.31.02.2. 01.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab.Tab	Output	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	100%	369.999.900	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab.Ta b.	Output	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	100 %	398.706.6 00
							-	<b><u>36.538.110. 406</u></b>					-	<b><u>11.398.90 9.973</u></b>

\* Catatan Penting Rancangan Akhir dengan Hasil Analisis kebutuhan , untuk sementara Usulan Kebutuhan Dananya Adalah sama Rp 36.538.110.406 ( Kebutuhan Dana serta peogram/kegiatan/sub kegiatan akan mengalami perubahan untuk tahapan renja berikutnya menyesuaikan PAGU yang ttersedia beserta hasil Forum OPD dan Musrenbang

Program :  
5  
Kegiatan :  
10

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN**  
**PERDAGANGAN KABUPATEN TABANAN**

**IV.1. Rencana Kerja**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dinas perindustrian dan Perdagangan merencanakan beberapa kegiatan yang diarahkan untuk mencapai target Renstra Dinas perindustrian dan Perdagangan; 2021-2026 . Kegiatan yang ditampilkan dalam Renja ini hanya kegiatan yang memiliki nilai strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan kegiatan yang terkait dengan penunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas perindustrian dan Perdagangan seperti kegiatan rutin ditampilkan dalam laporan keuangan seperti dalam Lampiran. Target Kinerja Kantor Dinas perindustrian dan Perdagangan di tahun 2022:

Target Kinerja Tahun 2022  
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tabanan

NO	SASARAN STRATEGIS	Target Renstra Perangkat Daerah pada	TARGET KINERJA
		TAHUN 2022	TAHUN 2022
1	Terlaksananya reformasi birokrasi	A	A
2	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan yang berdaya saing	100 %	100 %
3	Meningkatnya tertib ukur	20 %	20 %
4	Meningkatnya komoditi unggulan daerah yang dipromosikan	1 event	1 event
5	Meningkatnya daya saing industri melalui peningkatan kualitas produk untuk menumbuh kembangkan industri kecil	1,52%	1,52%

## **IV.2. Pendanaan**

Pendanaan untuk Anggaran kegiatan Tahun 2022 sepenuhnya bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan, kecuali untuk belanja tidak langsung yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

Tabel 4.1

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022  
KABUPATEN TABANAN**



**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023 KABUPATEN TABANAN**

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			BESARAN/VOLUME	CATATAN
	<b>3.30.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					<b>10.580.610.506</b>	
<b>I</b>	<b>3.30.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Kab Tab.</b>	<b>Outcom e</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD</b>	<b>100%</b>	<b>10.035.610.656</b>	
	<b>1</b>	<b>3.30.01.2.01</b>	<b>Kab Tab.</b>	<b>output</b>	<b>Jumlah Dokumen Sakip Yang Tersedia</b>	<b>1A</b>	<b>4.999.600</b>	
		3.30.01.2.01.01	Kab Tab.	output	Tersusunnya Dokumen LKJIP	1 Jenis Dokumen	2,999,800	
		3.30.01.2.01.05	Kab Tab.	output	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja	2 Jenis Dokumen	1,999,800	
	<b>2</b>	<b>3.30.01.2.02</b>	<b>Kab Tab.</b>	<b>output</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Keuangan Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>7.049.012.806</b>	
		3.30.01.2.02.01	Kab Tab.	output	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	7.044.013.306	
		3.30.01.2.02.07	Kab Tab.	output	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	2 Jenis Dokumen	4.999.500	
	<b>3</b>	<b>3.30.01.2.06</b>	<b>Kab Tab.</b>	<b>output</b>	<b>Lancarnya Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>427.764.750</b>	

		3.30.01.2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	1.992.000	
		3.30.01.2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	3.498.300	
		3.30.01.2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	168.207.500	
		3.30.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	78.846.900	
		3.30.01.2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	3.000.000	
		3.30.01.2.06.0 7	Penyediaan Bahan Material	Kab Tab.	output	Tersedianya kebutuhan Penyediaan Bahan Material	100%	93.644.050	
		3.30.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tab.	output	Terlaksananya kebutuhan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	78.576.000	
	<b>4</b>	<b>3.30.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab Tab</b>	<b>Output</b>	<b>Lancarnya Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>99.410.000</b>	
		3.30.01.2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tab	Output	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	99.410.000	
	<b>5</b>	<b>3.30.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab Tab</b>	<b>Output</b>	<b>Lancarnya Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>2.261.516.700</b>	
		3.30.01.2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Tab	Output	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2.000.000	
		3.30.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Tab	Output	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	114.997.500	
		3.30.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Tab	Output	Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	2.144.519.200	

	<b>6</b>	<b>3.30.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab Tab</b>	<b>Output</b>	<b>Lancarnya Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>192.906.800</b>	
		3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab Tab	Output	Persentase Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100%	81.456.300	
		3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Kab Tab	Output	Terpeliharanya gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	4.490.500	
		3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Tab	Output	Terpeliharanya gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	6.960.000	
		3.30.01.2.09.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Tab	Output	Terpeliharanya gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100.000.000	
	<b>II</b>	<b>3.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>Outcom e</b>	<b>Presentase bangunan pasar rakyat yang layak, terfasilitasi dn terawasi</b>	<b>100%</b>	<b>350.000.000</b>	
	<b>7</b>	<b>3.30.03.2.01</b>	<b>Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi Perdagangan</b>	<b>Kab Tab.</b>	<b>output</b>	<b>Presentase Sarana Distribusi Perdagangan yang terfasilitasi dan terawasi</b>	<b>100%</b>	<b>350.000.000</b>	
		3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab Tab.	output	Persentase sarana Distribusi Perdagangan yang terrevitalisasi	100%	350.000.000	
	<b>III</b>	<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Kab Tab.</b>	<b>Outcom e</b>	<b>Persentase UTTP yang ditera /tera ulang dan diawasi</b>	<b>20%</b>	<b>74.999.850</b>	
	<b>9</b>	<b>3.30.06.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>Kab.Tab</b>	<b>output</b>	<b>Persentase UTTP yang diTera/Tera Ulang dan diawasi</b>	<b>20%</b>	<b>74.999.850</b>	

		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Kab.Tab	output	Persentase UTTP yang bertanda tera sah dan berlaku	20%	49.999.900		
		3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab.Tab	output	Persentase UTTP dan pelaku usaha yang diawasi	20%	24.999.950		
<b>IV</b>		<b>3.30.07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Kab Tab.</b>	<b>Outcom e</b>	<b>Terlaksananya Promosi, produk unggulan kabupaten tabanan</b>	<b>1 event</b>	<b>120.000.000</b>		
	<b>10</b>	<b>3.30.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Kab Tab.</b>	<b>output</b>	<b>Terlaksananya Promosi, produk unggulan kabupaten tabanan</b>	<b>1 event</b>	<b>120.000.000</b>	-	
		3.30.07.2.01.01	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negari Ditingkat Kabupaten/Kota	Kab.Tab.	output	Terlaksananya Pemasaran Produk Unggulan Daerah	1 event	120.000.000		
		<b>3,31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>						<b>25.957.499.900</b>	
<b>V</b>		<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Kab.Tab.</b>	<b>Outcom e</b>	<b>Persentase Pengusaha Industri Kreatif Yang Berkembang</b>	<b>2%</b>	<b>25.957.499.900</b>		
	<b>11</b>	<b>3.31.02.2.01</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab.Tab.</b>	<b>Output</b>	<b>Persentase Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>25.957.499.900</b>		
		3.31.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dan pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab.Tab.	Output	Tersusunnya dokumen tentang pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan Perwilayahan Industri	100%	110.000.000		
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana	Kab.Tab.	Output	Meningkatnya Industri Kreatif yang berkembang	20 IKM	25.487.500.000		

			dan Prasaran						
		3.31.02.2.01.0 6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab.Tab.	Output	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	100%	369.999.900	
<b>TOTAL USULAN URUSAN PERDAGANGAN DAN URUSAN PERINDUSTRIAN</b>								<b><u>36.538.110.406</u></b>	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

a. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerjaserta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil dan fasilitas yang cukup

- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan telah mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.
- c. Rencana tindak lanjut OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 mendatang akan menetapkan 5 program dengan 9 kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan dan sesuai APBD tahun 2022. Rencana Kerja OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan tahun 2022 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 ( satu ) Tahun kedepan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja – OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan

pada tahun 2022, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan. Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia / aparat yang memadai , sumber dana dan fasilitas yang cukup, koordinasi yang baik serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan kata lain rencana kerja ini dapat berjalan dengan lancar apabila administrasi dan manajemen bisa seimbang dan berkesinambungan.

Diharapkan sekali Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD ) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan tahun 2022 dapat dijadikan pedoman dan perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( RKPD ) Kabupaten Tabanan Tahun 2022

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan. Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal.

Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat merata di seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Tabanan , dan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi, pengembangan dan pembangunan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan pertolongan kepada setiap usaha kita menuju perbaikan.

Tabanan, 16 Agustus 2022

Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Tabanan,



**Ir. I WAYAN KOTIO, MP**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19651231 1992031 179